

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik di wilayah Kecamatan Sooko.

Dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2024


MASLUCHMAN, SH, MSI
Pembina Tk.I
NIP. 19691119 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal
Daftar Isi	
BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 3
1.2	Landasan Hukum 5
1.3	Maksud dan Tujuan 7
1.4	Sistematika Penulisan 7
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu 9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 20
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5	Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 32
BAB III	Tujuan dan Sasaran
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 33
3.3	Program dan Kegiatan 33
BAB IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 40
BAB V	Penutup 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

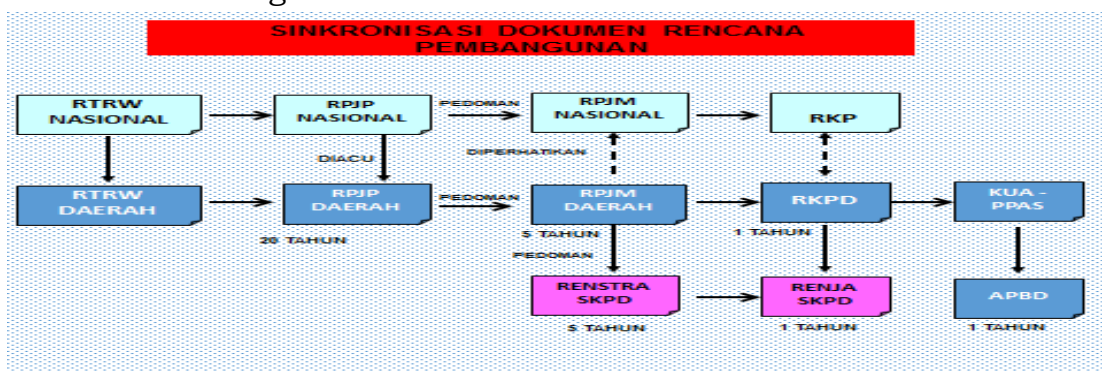
Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Sooko adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sooko Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Sooko yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Sooko.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 01 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD GOVERNMENT.

Adapun *tujuannya* adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Sooko pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Realisasi belanja pada Kecamatan Sooko Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			%	Rp.	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.000.000	95.74%	14.360.300	639.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	96,86%	3.390.000	110.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	92%	920.000	80.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	100%	1.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	92%	920.000	80.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	92%	920.000	80.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	96,14%	7.210.300	289.700
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.432.407.000	90,90%	2.211.134.033	221.272.967
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.432.407.000	90,90%	2.211.134.033	221.272.967
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	15.000.000	100%	15.000.000	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	100%	15.000.000	0
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	77.965.000	97.64%	76.128.850	1.836.150
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	99,89%	7.491.600	8.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	98.82%	19.763.000	237.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.465.000	96,43%	26.484.500	980.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	90.06%	4.503.000	497.000
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	98.87%	9.886.750	113.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	100%	8.000.000	0
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	72.350.000	94,36%	68.272.095	4.077.905
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.350.000	91.43%	41.463.135	3.886.865
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.000.000	99.29%	26.808.960	191.040
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	56.808.000	98.77%	56.108.410	699.590

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.500.000	98.01%	25.972.710	527.290
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.808.000	99.61%	22.718.200	89.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	98.90%	7.417.500	82.500
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	96.27%	24.065.500	933.500
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	25.000.000	96.27%	24.065.500	933.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.000.000	96.27%	24.065.500	933.500
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207.822.710	95.97%	199.440.500	8.382.210
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	207.822.710	95.97%	199.440.500	8.382.210
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.800.000	94.66%	49.980.000	2.820.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.480.000	95.20%	14.737.500	742.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	122.542.710	96.54%	118.308.000	4.234.710
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.000.000	96.56%	16.415.000	585.000
	TOTAL	2.902.352.710	91.81%	2.664.510.688	237.842.022

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapai Kinerja secara umum terlaksana dengan baik 91.81%, Pagu Anggaran sebesar Rp. **2.902.352.710,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.664.510.688,-** sisa anggaran **Rp. 237.842.022,-**

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- Anggaran **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** karena adanya ASN yang pensiun dan mutasi ke dinas/instansi lain.
- Anggaran **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** karena adanya proses negosiasi dengan penyedia atas pengadaan makan dan minum di setiap kegiatan sebagai upaya efisiensi belanja Kecamatan Sooko

- c. Anggaran **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** karena menyesuaikan penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik di Kantor Kecamatan Sooko;
- d. Anggaran **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** karena adanya kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai dan sedang dalam proses penghapusan aset.
- e. Anggaran **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan** karena adanya proses negosiasi dengan penyedia atas pengadaan makan dan minum di setiap kegiatan sebagai upaya efisiensi belanja Kecamatan Sooko
- f. Anggaran **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa** karena adanya proses negosiasi dengan penyedia atas pengadaan makan dan minum di setiap kegiatan sebagai upaya efisiensi belanja Kecamatan Sooko
- g. Anggaran **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** karena adanya proses negosiasi dengan penyedia atas pengadaan makan dan minum di setiap kegiatan sebagai upaya efisiensi belanja Kecamatan Sooko.
- h. Anggaran **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan** karena adanya proses negosiasi dengan penyedia atas pengadaan makan dan minum di setiap kegiatan sebagai upaya efisiensi belanja Kecamatan Sooko serta adanya sub belanja pada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan yakni honorarium narasumber

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

OPD : Kecamatan Sooko

Lembar

...

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluar Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.75	79,5	82,19	103%	-	-	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		100%	92	100	109%	100%	-	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 Dokumen	7 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	-

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	16 Dokumen	7 dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	16 Dokumen	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	70 Laporan	96%	NA	NA	NA	70 Laporan	-	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	53 Laporan	39 laporan	NA	NA	NA	53 Laporan	-	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	17 Laporan	-	-	-	-	17 Laporan	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas serta perleng kapannya yang dapat terpenuhi	30 Stel	-	-	-	-	30 Stel	-	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 Stel	-	-	-	-	30 Stel	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100 %	100%	92 %	98 %	107%	100 %	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-

		disediakan								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 Paket	1 paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 Bulan	12 bulan	NA	NA	NA	12 Bulan	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	NA	NA	NA	12 bulan	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 Bulan	12 bulan	NA	NA	NA	12 Bulan	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100 %	100%	87 %	94 %	108%	100 %	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 bulan	NA	NA	NA	12 Bulan	-	-

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 Orang	2 orang	NA	NA	NA	2 Orang	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100%	82 %	98.7 %	120%	100 %	-	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 Unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 Unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	-	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	1 paket	10 unit	10 unit	100%	1 Paket	-	-
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	42%	81 %	425 %	525%	81 %	-	-
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81 %	42%	81 %	425 %	525%	81 %	-	-

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 Pelayanan	42%	81%	425%	525%	1100 Pelayanan	-	-
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 Pelayanan	42%	81%	425%	525%	30 Pelayanan	-	-
		Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1070 Pelayanan	42%	81%	425%	525%	1070 Pelayanan	-	-
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi ,fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81 %	85%	81 %	100 %	123%	81 %	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	28 Fasilitasi	15 fasilitasi	23 Fasilitasi	23 fasilitasi	100.00 %	28 Fasilitasi	-	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 Fasilitasi	15 fasilitasi	8 Fasilitasi	8 Fasilitasi	100.00 %	28 Fasilitasi	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi	12 Fasilitasi	15 fasilitasi	5 fasilitasi	5 fasilitasi	100.00 %	12 Fasilitasi	-	-

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28 Fasilitasi	15 fasilitasi	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	100.00 %	28 Fasilitasi	-	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	15 fasilitasi	5 fasilitasi	5 Fasilitasi	100.00 %	24 Fasilitasi	-	-

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
			Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	A. Prosentase peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan B. IKM Pelayanan Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut :

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sooko

Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM	-	-	82	83	84	85	91,19	-	84	85	-
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	82,19	-	-	-	-
4	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	82	83	84	85	425%	-	84	85	-
5	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	-	-	82	83	84	85	100%	-	84	85	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Sooko diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Sooko

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Sooko bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Sooko yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Sooko;

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas ;
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Sooko namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
 2. Tingginya peluang pasar.
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
 2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
 3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Sooko yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Sooko untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sooko Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sooko Tahun 2025. Hasil review terhadap

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Sooko

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Sooko	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Sooko	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81		-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	28 dokumen	18.376.645	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Sooko	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	28 dokumen	18.376.645	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	6.125.215	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	6.125.215	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	16 dokumen	12.250.430	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	16 dokumen	12.250.430	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Sooko	Jumlah Laporan Keuangan yang dapat tersusun	70 laporan	4.270.316.217	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Sooko	Persentase realisasi anggaran	70 laporan	4.270.316.217	-

			sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu					Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Sooko	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 laporan	4.237.474.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Sooko	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 laporan	4.237.474.089	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Sooko	Jumlah laporan keuangan bulanan	17 laporan	32.842.128	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Sooko	Jumlah laporan keuangan bulanan	17 laporan	32.842.128	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Sooko	IP ASN Perangkat Daerah		29.311.250	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Sooko	IP ASN Perangkat Daerah		29.311.250	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stell	15.313.037	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Sooko	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stell	15.313.037	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Sooko	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		172.879.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Sooko	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		172.879.900	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Sooko	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	7.187.822	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Sooko	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	7.187.822	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sooko	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	83.365.531	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sooko	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	83.365.531	-
	Penyediaan bahan logistik Kantor	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	36.751.290	Penyediaan bahan logistik Kantor	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	36.751.290	-

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	6.125.215	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	6.125.215	-
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	0	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	0	-
	Penyediaan Bahan/Material	Kec Sooko	Jumlah Waktu Pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12.250.430	Penyediaan Bahan/Material	Kec Sooko	Jumlah Waktu Pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12.250.430	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	34.301.204	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sooko	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	34.301.204	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sooko	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	88.754.365	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sooko	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	88.754.365	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sooko	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	55.678.204	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sooko	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	55.678.204	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sooko	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 orang/bulan	33.076.161	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sooko	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 orang/bulan	33.076.161	-

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sooko	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	63.936.268	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sooko	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	63.936.268	-
											-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	30.626.075	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec Sooko	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	30.626.075	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec Sooko	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 unit	1,837.564	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec Sooko	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 unit	1,837.564	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	22.284.806	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Sooko	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	22.284.806	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Sooko	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	9.187.822	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Sooko	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	9.187.822	-
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec Sooko	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		35.362.250	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec Sooko	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		35.362.250	-

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Sooko	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	42.876.505	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Sooko	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	42.876.505	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	30 pelayanan	3.062.607	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	30 pelayanan	3.062.607	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Sooko	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1070 pelayanan	39.813.897	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Sooko	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1070 pelayanan	39.813.897	-
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	425.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	425.000.000	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan Masyarakat	28 fasilitasi	425.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	28 fasilitasi	425.000.000	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 fasilitas	229.103.866	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Sooko	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 fasilitas	229.103.866	-

	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 fasilitas	12.250.430	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 fasilitas	12.250.430	-
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28 fasilitas	42.876.505	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28 fasilitas	42.876.505	-
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28 fasilitas	45.347.416	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Sooko	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28 fasilitas	45.347.416	-

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Sooko melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Sooko secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sooko	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 ekor hewan qurban idul adha	Hibah Sapi untuk 1 desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sooko ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sooko Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
	6. Penyediaan Bahan / Material
	7. Pengadaan Barang milik Daerah
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sooko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Sooko	81		APBD Kab.	Kec. Sooko	81	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Sooko	28 dokumen	18.376.645	APBD Kab.	Kec. Sooko	28 dokumen	19.661.940
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Kec. Sooko	12 dokumen	6.125.215	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 dokumen	6.553.980
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Kec. Sooko	16 dokumen	12.250.430	APBD Kab.	Kec. Sooko	16 dokumen	13.107.960
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Sooko	70 laporan	4.270.316.217	APBD Kab.	Kec. Sooko	70 laporan	4.569.238.352

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	53 laporan	4.237.474.089	APBD Kab.	Kec. Sooko	53 laporan	4.534.097.275
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Kec. Sooko	17 laporan	32.842.128	APBD Kab.	Kec. Sooko	17 laporan	35.141.077
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Sooko		15.313.037	APBD Kab.	Kec. Sooko		15.313.037
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Sooko	30 stell	15.313.037	APBD Kab.	Kec. Sooko	30 stell	15.313.037
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Sooko	100%	184.981.493	APBD Kab.	Kec. Sooko	100%	197.930.197
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sooko	1 paket	7.187.822	APBD Kab.	Kec. Sooko	1 paket	7.690.969
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Sooko	1 paket	83.365.531	APBD Kab.	Kec. Sooko	1 paket	92.411.118
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan logistik Kantor yang tercukupi	Kec. Sooko	12 bulan	36.751.290	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 bulan	39.323.880
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kec. Sooko	1 paket	6.125.215	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 bulan	6.553.980

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sooko	12 bulan	12.250.430	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 bulan	13.107.960
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sooko	12 bulan	34.301.204	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 bulan	36.702.288
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Kec. Sooko	100%	88.754.365	APBD Kab.	Kec. Sooko	100%	94.967.170
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sooko	12 bulan	55.678.204	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 bulan	59.575.678
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Kec. Sooko	2 orang/bulan	33.076.161	APBD Kab.	Kec. Sooko	2 orang/bulan	35.391.492
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Sooko	100%	63.936.268	APBD Kab.	Kec. Sooko	100%	68.411.806
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec. Sooko	2 unit	30.626.075	APBD Kab.	Kec. Sooko	2 unit	32.769.900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Kec. Sooko	2 unit	1,837.564	APBD Kab.	Kec. Sooko	2 unit	1.966.194

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Sooko	2 unit	22.284.806	APBD Kab.	Kec. Sooko	2 unit	23.844.742
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kec. Sooko	1 paket	9.187.822	APBD Kab.	Kec. Sooko	1 paket	9.830.969
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	81%	42.876.505	APBD Kab.	Kec. Sooko	81%	45.877.860
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Sooko	81%	42.876.505	APBD Kab.	Kec. Sooko	81%	45.877.860
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	30 pelayanan	3.062.607	APBD Kab.	Kec. Sooko	30 pelayanan	3.276.960
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Sooko	1070 pelayanan	39.813.897	APBD Kab.	Kec. Sooko	1070 pelayanan	42.600.870
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Sooko	84%	425.000.000	APBD Kab.	Kec. Sooko	85%	455.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Kec. Sooko	28 fasilitasi	425.000.000	APBD Kab.	Kec. Sooko	28 fasilitasi	455.000.000

		masyarakat, kesejahteraan masyarakat							
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sooko	28 fasilitas	229.103.866	APBD Kab.	Kec. Sooko	85%	60.296.616
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sooko	12 fasilitas	12.250.430	APBD Kab.	Kec. Sooko	12 fasilitas	13.107.960
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	28 fasilitas	42.876.505	APBD Kab.	Kec. Sooko	28 fasilitas	45.877.860
7.01.06.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sooko	28 fasilitas	45.347.416	APBD Kab.	Kec. Sooko	28 fasilitas	48.521.735

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN SOOKO

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2025	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rp.)	SUMBER DANA	KET.
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Sooko	Nilai IKM	83					84	85		
						Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61								
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai				18.376.645	19.661.940		

	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						target		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	6.125.215	6.553.980		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	16 dokumen	12.250.430	13.107.960		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%			4.270.316.217	4.569.238.352		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 dokumen	4.237.474.089	4.534.097.275		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Jumlah laporan keuangan bulanan	53 dokumen	32.842.128	35.141.077		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						IP ASN Perangkat Daerah	59,30			15.313.037	16.384.949		
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan								Jumlah bimtek peningkatan kompetensi	-	0	0		

		an tugas dan fungsi								ASN yang dilaksa nakan					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya								Jumlah penyediaan pakaian di- nas PNS ser- ta perleng- kapannya	30 stel	15.313.037	16.384.949		
	7.01.01.2.06	Administ rasi Umum Perangka t Daerah						Persentase penyediaa n Administra si Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%			184.981.493	184.981.493		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor								Jumlah jenis komponen ins talasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	7.187.822	7.690.969		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor								Jumlah jenis peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	1 paket	86.365.531	92.411.118		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor								Jumlah waktu penyediaan bahan logistic kantor	12 bulan	36.751.290	39.323.800		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan								Jmlh jenis barang cetakan dan pengganda an yang disediakan : kertas	1 paket	6.125.125	6.553.908		

										kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy					
	7.01.01.2. 06.07	Penyediaa n Bahan/M aterial								Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	12.250.430	13.107.960		
	7.01.01.2. 06.09	Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD								Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	34.301.204	36.702.288		
		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah						Persentase penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta han daerah sesuai kebutuhan	87%			88.754.365	94.967.170		
	7.01.01.2. 08.02	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	55.678.204	59.575.678		
	7.01.01.2. 08.04	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 orang	33.076.161	35.391.492		

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%			63.936.268	68.411.806		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan								Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 kendaraan	1.717.350	1.833.564		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	67.500.000	22.284.804		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	17.000.000	9.187.822		

	7.01.02.2 .04.01	Program Penyelen ggaraan Pemerint ahan Dan Pelayana n Publik				Persent ase pelayan an yang terlayan i sesuai standar pelayan an	81 %				35.362.250	42.876.505			
	7.01.02.2 .04.02	Pelaksana aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat						Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	715 pelayana n			42.876.505	45.877.860		
	7.01.03	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan		3.062.607	3.276.990		
		Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizi nan								Jumlah PelayananNon on Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	715 pelayanan	39.813.897	42.600.870		
		Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerint ahan Desa				Persent ase hasil koordin asi yang ditinda klanjuti	81 %								

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	16 fasilitasi					
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 fasilitas	229.103.866	60.296.616	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 fasilitasi	12.250.430	13.107.960	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28 fasilitasi	42.876.505	45.877.860	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28 fasilitasi	45.347.416	48.521.735	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Insfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Sooko. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sooko di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sooko berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
- b. Kecamatan Sooko berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sooko Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sooko Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sooko Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Sooko selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sooko Tahun 2025 tentu

juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Sooko juga memberi umpan balik dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Sooko ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan serta memberikan manfaat bagi proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2024



MASLUCHMAN, SH, MSI

Pembina Tk.I

NIP. 19691119 199803 1 005